



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

DINAS SOSIAL

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 telah selesai di susun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini mempunyai manfaat yang cukup besar bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan kalangan Lembaga Legislatif untuk melihat sejauhmana kemajuan Program dan Kegiatan Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap daerah selama satu Tahun Anggaran dan merupakan Evaluasi serta Pertanggungjawaban terhadap Kinerja selama melaksanakan Pembangunan di daerah.

Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Luwu akan menyampaikan Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Anggaran Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu

Demikian kami sampaikan laporan ini, semoga dapat menjadi bahan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan Strategi dan Kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan Kinerja Dinas Sosial kedepannya

Belopa, Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
Hj. HASLIANA NURDIN, S.Pt., M.M
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 196905121995032004

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Sosial Kab. Luwu

Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota dan ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Serta bagi Satuan Kerja Perangkat daerah dan Unit Kerja Mandiri lingkup Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Menyadari hal itu dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, maka Dinas Sosial Kab. Luwu selaku salah satu Instansi Teknis daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Sosial menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel, diperlukan suatu media pertanggungjawaban .

Dalam Tahun 2024, Dinas Sosial Kab. Luwu telah berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini, menuju terciptanya suatu pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
D. ASPEK STRATEGIS.....	5
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGIS.....	9
1. Visi dan Misi.....	9
2. Tujuan dan Sasaran.....	10
3. Strategi dan Kebijakan.....	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024.....	15
BAB III KINERJA.....	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	20
B. REALISASI ANGGARAN.....	25
BAB IV PENUTUP.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Luwu adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Luwu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Luwu dalam mewujudkan visi Kabupaten Luwu ***Menuju Masyarakat yang Maju, Mandiri, Mampu Bersaing dan Bernuansa Religi.***

Dasar pembentukan Dinas Sosial Kab. Luwu adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. Sedangkan Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kab. Luwu Tahun 2024 ini, disusun dengan berpedoman kepada :

1. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

LKjIP Dinas Sosial Kab. Luwu ini dibuat selain untuk memenuhi amanat Undang-Undang, juga untuk memenuhi tuntutan publik akan adanya transparansi dan pengelolaan keuangan sekaligus kinerja daerah. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung bersih, bertanggung jawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Dengan dasar tersebut, Laporan Kinerja (LKj) ini sebagai bagian dari desain besar Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses pemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan *Good Governance*. LKj ini dapat disusun karena adanya sinergitas antara proses Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun peralihan dari Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Luwu periode Tahun 2019-2024. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024

serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu pada Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten Luwu dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016, Dinas Sosial Kab. Luwu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Luwu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Sosial Kab. Luwu

Tahun 2024

pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016, Dinas Sosial Kab. Luwu menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Dinas;
2. Penyusunan Rencana Strategis Dinas;
3. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;
4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas pejabat struktural, fungsional dan staf lainnya lingkup dinas;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring program/kegiatan dinas;
6. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, Dinas Sosial Kab. Luwu mempunyai rincian tugas pokok sebagai berikut:

1. Merumuskan rencana strategis dan program kerja dinas sesuai dengan visi misi daerah;
2. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas;
3. Menyelenggarakan rencana strategis dan program kerja dinas;
4. Menyelenggarakan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur;
5. Mengidentifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten;

6. Mengembangkan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten;
7. Melaksanakan tugas kewenangan otonomi daerah di bidang sosial;
8. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan/atasan serta pelayanan kepada masyarakat;
9. Membina pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan dinas;
10. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil kerja yang dicapai.

D. ASPEK STRATEGIS

1. Bidang Sosial

- a) Dampak permasalahan sosial yang cukup signifikan diantaranya permasalahan kemiskinan. Dalam hubungan ini diperlukan kesamaan pemahaman visi dan misi antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan agar bersama-sama menanggulangi masalah tersebut.
- b) Sejalan dengan perkembangan Kab. Luwu kearah kota yang maju dan mandiri, permasalahan sosial dan psikologis menimbulkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang semakin meningkat. Seyogyanya dibutuhkan kerangka fikir lintas sektoral agar jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut dapat ditekan jumlahnya.
- c) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Karang Taruna sebagai pilar pemberdayaan sosial sangat

potensial untuk membantu meningkatkan fungsi sosial, namun keberadaannya masih membutuhkan pembinaan yang optimal dari instansi sosial.

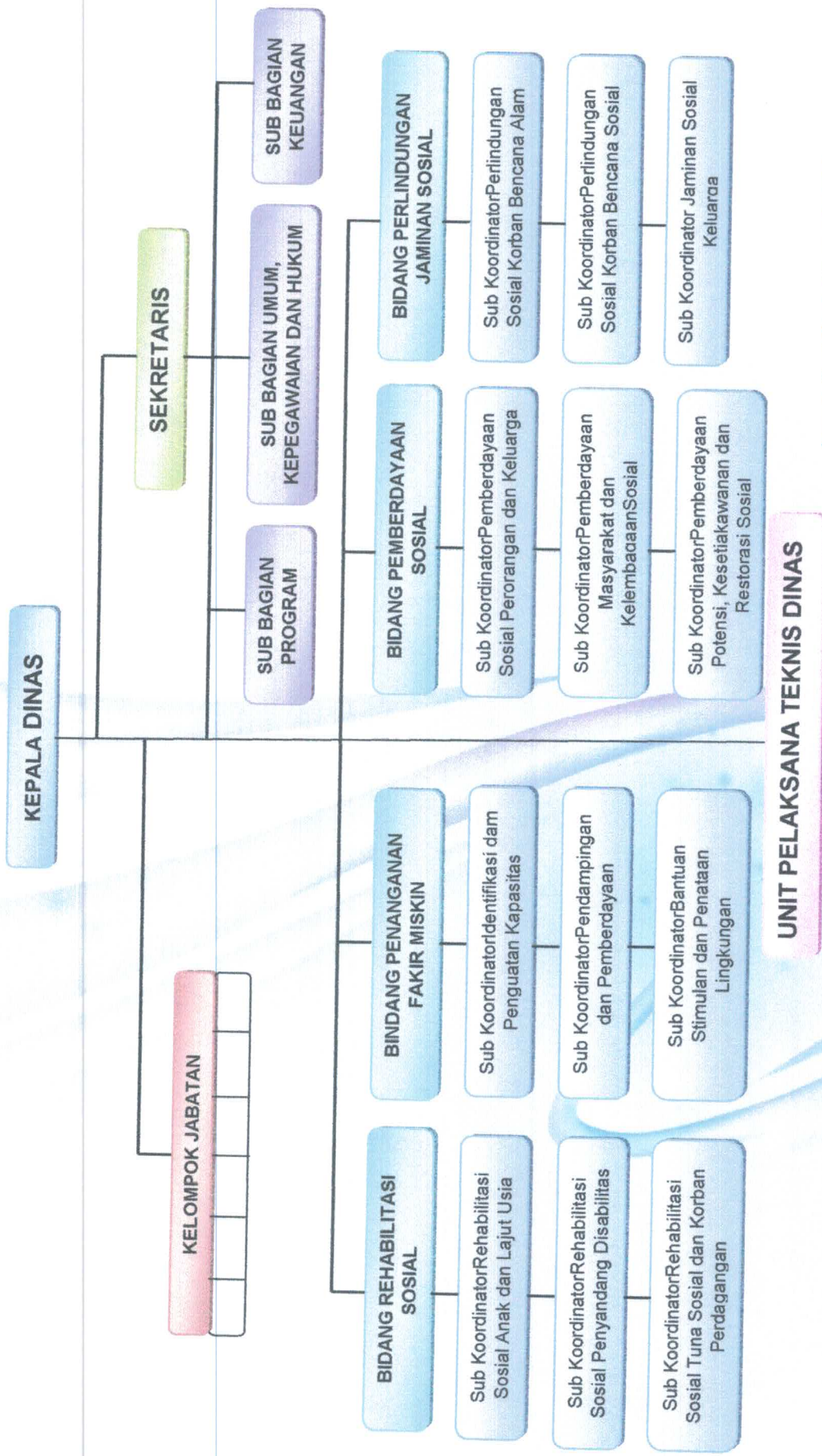
E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Sosial Kab. Luwu terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas (Eselon II/b), 1 (satu) Sekretaris (Eselon III/a), 4 (empat) Kepala Bidang (Eselon III/b), 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a), 12 (dua belas) sub Koordinator (Eselon IV/a), Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 - a) Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b) Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - c) Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
 - a) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lajut Usia;
 - b) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

- c) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan;
- 5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
 - a) Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga;
 - b) Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan sosial;
 - c) Sub Koordinator Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- 6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
 - a) Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b) Sub Koordinator Pendampingan dan Pemberdayaan;
 - c) Sub Koordinator Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU



UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Sosial Kab. Luwu sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu, perlu secara terus-menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan, dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu, Dinas Sosial Kab. Luwu harus mempunyai Visi, sebagai cara pandang jauh ke depan tentang Kearsah mana Dinas Sosial kedepannya, dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Maka Visi Dinas Sosial Kab. Luwu adalah :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKEADILAN"

Visi tersebut diatas mengandung makna, sebagai berikut:

- Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan adalah Serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan, maupun rehabilitasi

guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara memadai.

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi dapat terwujud apabila Instansi Pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi masalah dan kendala yang dihadapi.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kab. Luwu sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka perlu menetapkan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Sosial Kab. Luwu sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.
- b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial
- c) Peningkatan Pelayanan Sosial yang berkeadilan
- d) Peningkatan Kualitas SDM PSKS

2. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Sosial Kabupaten Luwu, perlu ditetapkan tujuan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang diserahkan kepada Perangkat Daerah. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal,

lebih berhasil, lebih maju, atau dengan kata lain menjadi suatu realita antara keinginan dan kenyataan pada kurun waktu tertentu.

Untuk menjabarkan Misi Dinas Sosial Kab. Luwu, diarahkan pencapaian tujuan masing-masing Misi, sebagai berikut:

MISI		TUJUAN STRATEGIS	
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.	▷	<i>Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan, sumber daya dan manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.</i>
2.	Peningkatan Sarana dan Prasanara Kesejahteraan Sosial.	▷	<i>Meningkatnyapenanganan terhadap PMKS</i>
3.	Peningkatan Pelayanan Sosial yang berkeadilan	▷	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi PMKS</i>
4.	Peningkatan Kualitas SDM PSKS	▷	<i>Meningkatnya Peran Aktif SDM PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</i>

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan tujuan dari perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang diharapkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem Perencanaan Strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

3. Strategi dan Kebijakan

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kab. Luwu, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Strategi

Mengacu kepada visi dan misi Dinas Sosial yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Luwu TA 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut:

- Strategi Umum

- 1) Meningkatkan Kemandirian para Penyandang Masalah Sosial (PMKS)
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

b. Kebijakan

Pelaksanaan pembangunan di bidang sosial di daerah ini disesuaikan dengan sumber daya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Luwu.

Adapun kebijakan pembangunan Dinas Sosial di Kabupaten Luwu sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum

Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 – 2024, pada bidang sosial diprioritaskan untuk peningkatan kualitas SDM dan aparat

bidang kesejahteraan kemandirian para PMKS, peningkatan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, peningkatan pengetahuan dan keterampilan penanganan masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian sosial.

2. Kebijakan Khusus

- a) Pembinaan fakir miskin / keluarga miskin
- b) Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- c) Penanggulangan korban bencana
- d) Penyantunan lanjut usia terlantar
- e) Pembinaan dan Perlindungan Kessos Anak
- f) Pembinaan organisasi sosial
- g) Pemberdayaan Karang Taruna
- h) Pemberdayaan TKSK/PSM
- i) Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
- j) Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan dan sosial / K2KS
- k) Peningkatan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha
- l) Peningkatan kompetensi aparatur bidang kesejahteraan sosial
- m) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial
- n) Perbaikan sistem pengendalian manajemen dan proses penanganan PMKS
- o) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat

- p) Pemberdayaan sosial korban bencana
- q) Menumbuhkembangkan relawan sosial
- r) Pembinaan SATGAS Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
- s) Penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah, bencana alam dan bencana lainnya
- t) Pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kab. Luwu dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Nilai Sakip	B
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Sangat Baik/92,34)
3	Persentase PMSK/PSKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	86%
4	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	77,1%
5	Persentase Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	92,72%
6	Cukupan Lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina	8 LKSA
7	Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	90%

C. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kab. Luwu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Efisien dan Efektif		
Terdistribusinya Surat-Surat Dinas	Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat	1.400 Surat
Terpenuhinya Pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
Terpeliharanya Perizinan Kendaraan Dinas dan Tersedianya Jasa Sopir untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran	Beroperasinya Kendaraan Dinas Operasional	19 Unit
Terlaksananya Kebersihan Kantor	Terwujudnya Kebersihan dan keindahan Kantor	3 Unit
Terwujudnya pencahayaan memadai	Tercapainya Pelayanan Prima	12 Bulan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	12Jenis Koran/Tabloid
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor	12 Bulan
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terciptanya Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait	64 Kali

Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Kunjungan ke Dalam Daerah	Terciptanya Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	180 Kali
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian dan Aset	Terwujudnya Pelayanan Prima	12 Bulan
Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran	12 Unit
Terlaksananya Pemeliharaan gedungkantor	Terpeliharanya gedung kantor	2 unit
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	5 Mobil dan 14 Motor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer/Peralatan/Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Pelayanan Prima	7 Unit
Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
Terlaksananya Evaluasi terhadap 8 LKSA	Terwujudnya pengelolaan LKSA yang baik	7 LKSA
Terlaksananya Penanganan Gelandangan, Pengemis, Sakit Jiwa, HIV/AIDS	Terpenuhinya layanan terhadap penyandang kejiwaan	3 Oranng Gelandangan Pengemis yang mendapat penanganan

			layanan kesejahteraan sosial
Terlaksananya Pendampingan Penyandang Disabilitas dan Lansia	Terpenuhinya layanan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas dan Lansia	90 Orang Penyandang Disabilitas dan 120 Orang Lanjut Usia mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	
Terpenuhinya Layanan Data dan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			
Terlaksananya verifikasi dan validasi data DTKS di 227 Kelurahan/ Desa	Tersedianya Data Base DTKS yang up to date	237.842 Individu / 81.478 Keluarga	
Terlaksananya Penyaluran, Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Program PKH dan BPNT	Jumlah Penerima Program PKH dan BPNT	21.213 Keluarga Penerima Manfaat PKH, 12.343 Keluarga Penerima Manfaat BPNT	
Terpenuhinya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Korban Bencana			

Terlaksananya Pendampingan dan Kordinasi PKH	Terpenuhinya Kebutuhan Kesehatan dan Pendidikan RTSM/KSM	17.095 KPM
Terlaksananya Tanggap Darurat Korban Bencana Sosial dan Alam	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan pelayanan tanggap darurat terhadap korban bencana	961 Jiwa dari 1247 jiwa
Terciptanya Peningkatan Mutu Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
Terlaksananya Sosialisasi Layanan LK3	Terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang Keberadaan dan Fungsi LK3	3 Desa. 3 Kecamatan. 1 Lokasi di SMK 7 Kecamatan Suli (Jumlah Peserta 25 Orang). 1 Lokasi di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat. 2 Desa (Lampuara & Bassiang) di Kecamatan Ponrang Selatan

Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepeloporan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	Terwujudnya Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepeloporan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial melalui Partisipasi Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Nasional	7 Sekolah Dasar di Kecamatan Belopa berpartisipasi dalam peringatan Hari Pahlawan
--	--	---

BAB III

KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berusaha menyajikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, termasuk didalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan kinerja Perangkat Daerah di tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Adapun pengukuran kinerja dari pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Sosial Kab. Luwu Tahun 2024 dapat digambarkan dalam Tabel Pengukuran Kinerja berikut :

Kabupaten : Luwu
Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	12 Jenis	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.783.691
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.882.901

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.185.270
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.656.155
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.040.155
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.489.055
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.530.155
	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	8 Jenis	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.005.143.541
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.847.531.141
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	151.320.000
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Sub Kegiatan: Pengelola dan Penyiapan Bahan Taggapan Pemeriksaan	2.564.205
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	14 Laporan	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.728.195

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Jenis	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.123.307
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.123.307
	Jumlah penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	8 Jenis	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.732.691
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.328.600
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.718.200
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Bulan	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.080.096
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	54 Paket	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	26.071.409
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	1.062.500
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.671.886
	Jumlah jasa penunjang urusan perangkat daerah	1 Jenis	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.571.124

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500 Laporan	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.296.287
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288 Laporan	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.200.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.074.837
	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	19 Unit	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	125.524.563
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.401.515
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 unit	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.910.000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.213.048
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	2 PSKS	Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	25.425.375
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.428.254
	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Sertifikat	Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.997.121

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.155.814
	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.155.814
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	5 Layanan	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	22.615.478
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Sub Kegiatan: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	40.016
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.583.059
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.025 Orang	Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	16.992.403
	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Layanan	1 Layanan	Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	7.653.652

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	7.653.652
PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL				
	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Layanan	Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	441.868.910
	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60.000 Keluarga	Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	126.570.085
	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000 Keluarga	Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	315.298.825
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
	Jumlah Layanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	15 Layanan	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	35.630.253
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	35.630.253
	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 Layanan	Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	243.071.931

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Sub Kegiatan : Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna siaga Bencana	243.071.931
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
	Jumlah TMP yang di rehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	21.095.000
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	21.095.000

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.659.878.917	3.274.806.364	89,47%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.783.691	13.601.191	54,87%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.005.143.541	2.699.210.600	89,81%
	Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.123.307	5.923.007	72,91%

	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	216.732.691	183.533.883	84,68%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.571.124	260.404.844	93,14%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.524.563	112.132.839	89,33
2	Program Pemberdayaan Sosial	25.425.375	5.952.955	23,41 %
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	25.425.375	5.952.955	23,41 %
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	3.155.814	236.664	7,49%
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.155.814	236.664	7,49%
4	Program Rehabilitasi Sosial	30.269.130	74,150,800	95,03%
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	22.615.478	18.342.766	81,1%
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	7.653.652	0	0%
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	441.868.910	247.825.003	56,08%
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	441.868.910	247.825.003	56,08%
5	Program Penanganan Bencana	278.702.184	259.540.164	93,12%

	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	35.630.253	26.014.700	73,01%
	Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Siaga Bencana	243.071.931	233.525.464	96,07%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	19.630.000	11.902.000	60,63%
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	19.630.000	11.902.000	60,63%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp.4.458.930.330,00,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp.3.818.605.916,00-

BAB IV

PENUTUP

Sepanjang tahun 2024 ini beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu. Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya capaian target kinerja dari rencana strategi yang ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan dan pelayanan adalah keterbatasan anggaran dan jumlah personil yang kurang memadai. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kab. Luwu pada tahun mendatang, beberapa langkah strategi yang akan dilakukan antara lain :

1. Menerbitkan regulasi bidang kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme pegawai baik di dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam peningkatan SDM.
2. Lebih meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan kesejahteraan sosial pada PMKS
3. Memperluas cakupan sosialisasi dan capacity building terhadap masyarakat untuk lebih meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meskipun keterbatasan personil yang profesional pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu.

Demikian Laporan ini disusun untuk digunakan sebagai alat evaluasi yang terukur, jelas dan transparan mengenai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu secara keseluruhan sebagai bahan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang lebih baik di waktu yang akan datang.



Belopa, 15 Februari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL

Hj. HASLIANA NURDIN, S.Pt., M.M
Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 196905121995032004